



KABUPATEN BENGKULU TENGAH

MINGGU, 22 SEPTEMBER 2019

SUMBER BERITA

	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
x	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERISAAN PERHATIAN KHUSUS

Penggunaan DD DesaTamiyang Diaudit

BENTENG, BE - Dana Desa (DD) tahap I dan tahap II Desa Tamiyang, Kecamatan Pagar Jati, Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng) sampai saat ini tak kunjung cair.

Hal ini menimbulkan pertanyaan bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Benteng selaku Organisasi Perangkat

Daerah (OPD) teknis. Lantaran tak menemukan solusi, DPMD akhirnya angkat tangan dan meminta agar Inspektorat Daerah (Ipda) Kabupaten Benteng melakukan audit terhadap pengelolaan keuangan DD tahun anggaran 2018 silam.

"Terkhusus di Desa Tamiyang, laporan DD tahun 2018 juga belum tutup buku dan

dalam waktu dekat akan diaudit Inspektorat," kata Kepala DPMD Benteng, Drs Tomi Marisi MSi melalui Kabid Pemerintahan Desa (Pendes), Edi Susila SSTP MSi.

Dijelaskan Edi, belum selesainya tutup berdampak pada pengesahan dokumen anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes). Perlu diketahui, sambung Edi,

tanpa dokumen APBDes, usulan pencairan DD tahun berikutnya dipastikan tak bisa diproses.

"Memang sedikit terlambat. Akan tetapi, itu lebih baik dibandingkan dengan tidak cair sama sekali dan menjadi Silpa," terang Edi.

Dari 142 desa se-Kabupaten Benteng, beber Edi, hanya 2 desa yang belum mencair-

kan DD. Selain Desa Tamiyang, DD Dusun Baru II, Kecamatan Karang Tinggi juga belum dikucurkan.

"Belum disalurkannya DD Dusun Baru karena proses administrasi laporan yang belum selesai. Hal ini terjadi setelah Kepala Desa (Kades) definitif ditahan tim Tipidkor Kejari BU atas dugaan tindak

pidana penyimpangan DD tahun 2018," ungkap Edi.

Disampaikan Edi, suntikan DD dari Pemerintah Pusat merupakan upaya untuk mengejar ketertinggalan pembangunan infrastruktur di tingkat desa. Ditahun 2019 ini, terang Edi, total DD ditetapkan sebesar Rp 111.163.857.000 untuk 142 desa.

"Kami rutin melakukan

monitoring dan evaluasi pada penyerapan DD. Pun begitu, keterbatasan sumber daya manusia membuat pengawasan tak bisa maksimal. Sebab itulah, diperlukan figur Kades yang memang berkeinginan kuat untuk membangun desa. Sehingga, DD bisa terserap maksimal dan tepat sasaran," demikian Edi. (135)